

LABOR MOVEMENT



LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
322.2
Hug
P

**PERAN STUDI DAN PETA AFILIASI POLITIK ORGANISASI
PEKERJA: STUDI KASUS GERAKAN ORGANISASI
PEKERJA DI SURABAYA SELAMA 1998 – 2000**

Oleh:

Drs. KRIS NUGROHO, MA.
Dra. DWI WINDYASTUTI, MA., MPH



21/03
10

3000129033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 68

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000129033141

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
 DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian	: Peran Studi dan Afiliasi Politik Organisasi Pekerja : Studi Kasus Gerakan Organisasi Pekerja Di Surabaya Selama 1998 - 2002
b. Macam Penelitian	: Terapan
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Drs. Kris Nugroho, MA
b. Jenis kelamin	: Laki-laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Lektor/III d/ 131 801 408
d. Jabatan Sekarang	: Dosen FISIP
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: FISIP
f. Univ/Inst./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Politik
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 Orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 4 Bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah -----)



Mengetahui :
 Dekan Fak./Puslit. :

 Prof. DR. Herman Siahaan

 NIP 130 701 134

Surabaya, 25-9-2002

Ketua Peneliti

 Drs. Kris Nugroho, MA

 NIP 131 801 408

Menyetujui :
 Ketua Lembaga Penelitian Unair,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
 NIP 130 701 125

Ringkasan Hasil Penelitian

**PERAN STUDI DAN PETA AFILIASI POLITIK ORGANISASI PEKERJA :
STUDI KASUS GERAKAN ORGANISASI PEKERJA DI SURABAYA
SELAMA 1998 – 2002**

(Kris Nugroho, Dwi Windyastuti, 2002, 40 hal)

Permasalahan penelitian ini berawal dari keingintahuan penulis untuk mengetahui dampak reformasi politik tahun 1998 terhadap pluralitas serikat pekerja/ organisasi pekerja yang kini makin menjamur, baik di tingkat nasional mau pun lokal. Pluralisme organisasi pekerja ini nampak dalam dua dimensi. Pertama, produk reformasi politik yang memberi payung politik bagi setiap warga negara untuk mendirikan asosiasi sosial dan politik secara bebas. Kedua, substansi politik organisasi pekerja adalah bertujuan untuk merebut ruang-ruang partisipasi politik yang di masa Orde Baru didominasi negara.

Metodelogi penelitian ini ditentukan sbb: sifat penelitian diskriptif, tehnik penarikan sampling menggunakan model purposif dengan memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, koleksi data dengan model wawancara mendalam (*deep interview*) dengan responden yang telah dipilih sesuai kepentingan penelitian.

Temuan dan analisis diarahkan pada fenomena bahwa pluralitas organisasi pekerja menggambarkan satu hal, yakni wacana ideologi dan politik Orde Baru yang berupaya untuk mengeliminir kekuatan-kekuatan anti negara (penguasa) telah berakhir. Hadirnya serikat pekerja dengan beragam wacana ideologi (sosial demokrasi, pragmatis dan agama) menunjukkan –nantinya—isu-isu sekitar upah kerja atau tuntutan-tuntutan ekonomi secara umum, dapat bergulir menjadi isu politik strategis sekaligus alat perjuangan baru bagi massa pekerja di Indonesia.

Karena itu, asumsi bahwa organisasi pekerja semata-mata wadah kepentingan ekonomi pekerja dalam memperjuangkan upah kerja tidaklah sepenuhnya tepat.

Organisasi pekerja dalam artian tertentu potensial sarana perjuangan identitas “klas” bagi massa pekerja yang saat ini makin terbuka dalam menyuarakan kepentingan ekonominya. Massa pekerja yang makin kritis secara terbuka mengkritik dan menggugat institusi-institusi politik (dewan dan pemerintah) yang dianggap turut bertanggungjawab atas ketidakadilan/ ketimpangan sistem pengupahan. Inilah suara “klas” massa pekerja yang substansi politiknya sebetulnya menghendaki perubahan kebijakan sistem pengupahan.

Selama proses reformasi politik yang dihitung dari berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru tahun 1998 sampai dengan 2002, jumlah serikat kerja/ organisasi pekerja meningkat tajam. Kalau pada era Orde Baru, kepentingan pekerja diarahkan untuk disalurkan pada satu organisasi tunggal pekerja yaitu SPSI, maka pada era reformasi pekeraja memiliki kebebasan untuk mendirikan dan menyalurkan kepentingan mereka pada organisasi pekerja yang sesuai dengan aspirasi mereka. Di Surabaya saja, terdeteksi ada 23 organisasi pekerja yang seringkali menyatakan sikap (lewat aksi demo dan mogok) keras kalau terjadi praktik ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Demo pekerja besar-besaran tahun 2000 di Surabaya yang menuntut kenaikan UMR 2001, merupakan prakarsa jaringan organisasi pekerja tersebut.

Begitu pula dengan aksi demo/mogok kerja di sejumlah unit industri di Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo, Gresik, Pasuruan) dilakukan dengan berani tanpa takut represi aparat militer sebagaimana era Orba yang lalu. Para pekerja memiliki kesadaran bahwa posisinya kuat karena hak-hak demo dan mogok dijamin/ dilindungi undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat kerja/ buruh sehingga posisis tawar mereka makin kuat tatkala berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah (Depnakertrans). Tokoh SBR, FNPBI dua organisasi pekerja yang memiliki haluan sosial demokrasi, pun sependapat gerakan pekerja berpotensi menjadi gerakan politik yang kritis tidak saja pada pengusaha dan pemerintah tapi juga pada sistem

kapitalisme yang mengeksploitasi pekerja sehingga pekerja makin marginal dan mengalami proses pemiskinan.

Adanya undang-undang diatas politik bagi beberapa tokoh/ aktivis pekerja memberi jaminan hukum para pekerja untuk mengkritis keadaan perburuhan seluas-luasnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi tawar-menawar pekerja semakin kuat tatkala berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah (Depnakertrans) guna menentukan besarnya upah dan insentif-insentif normatif lainnya.

Kuatnya posisi tawar pekerja ini dapat dilihat dari peran serta wakil-wakil serikat pekerja bersama-sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam setiap perencanaan kenaikan upah pekerja. Adanya komisi pengupahan yang terdiri dari wakil pengusaha, Depnakertrans/ pemerintah dan serikat pekerja, menunjukkan makin pentingnya posisi pekerja sebagai variabel sosial politik yang harus diperhitungkan kepentingannya sebelum pemerintah daerah menetapkan UMR yang baru.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Nomor Kontrak : 023/LIT/BPPK-SDM/TV/2002)

SUMMARY

STUDI OF POLITICAL AFFILIATION OF LABOR UNIONS : A CASE STUDY ON LABORS MOVEMENT IN SURABAYA IN 1998 – 2002.

The research focus on two basic goals : first, to explain the pluralism of labor unions in Surabaya as impact of political reform in the national politics; second to explain political belief system as a references of labor unions struggle.

Date collection method use interview model which select ten labor activists purposively as research informant. Ten informants are 2 represents of FNPBI Indonesia's Labor Stuggle National Front, 2 Sarbumusi (Indonesia Moeslim Labor Union), 2 SBR (People Labor Union) , 2 SPSI Reformasi (Indonesia Labor Union for Reform), 2 Yayasan Arek. In the field, reseacrher used guide interview to gain relevant date. Intensive discussion (at least 2 hours) with informants on labor policy, wages system, their political belief system, how they influent government's labor policy, labor strike and their response to the 2000 and 2001 UMR (region minimum wages) are standard questions to get quality of date.

All of the informants agreed that political reform began in 1998 have created more democratic political system that allowed people to establish or declare their social and political association, such as political parties, and labor unions. After government approved Act of Number 21/ 2000 on Labor Union, many activists declared the labor unions with plurality of their ideology such as socialism (FNPBI, SBR), social democracy (Areks), pragmatism (SPSI), Islam (Sarbumusi).

Some labor unions have radical perspective in their struggle to change undemocratics and exploitative labor policy (FNPBI and SBR). Others are pragmatics that to produce rules, labor policy and fair wages need step by step negotiation with government not radical struggle.

Kata Pengantar

Penelitian tentang perburuhan ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari rekan-rekan diskusi yang tak diragukan lagi memiliki komitmen yang tinggi terhadap nasib pekerja/buruh. Mereka telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data yang penulis perlukan. Diskusi dan tukar pikiran tentang persoalan buruh, yang penulis adakan membari gambaran tersendiri bahwa isu yang mereka perjuangankan bukan sekedar soal ekonomi (upah) tetapi juga menyangkut soal harga diri dan keadilan. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidaklah memberi dampak analitis yang berarti.

Penulis juga mengucapkan terima kasih pada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan dana guna kelangsungan penelitian ini. Penulis menyadari, hasil penelitian ini tidaklah sempurna 100 per sen, karena itu penulis membuka diri untuk kritik (masukan) yang sekiranya sangat berguna untuk perbaikan substansi penelitian ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah	1
BAB 2 Tinjauan Pustaka	7
BAB 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB 4 Metodologi Penelitian	15
BAB 5 Hasil dan Pembahasan	17
A. Sejarah Pekerja di Indonesia	17
B. Reformasi Perburuhan	22
C. Pluralitas Organisasi Pekerja	25
D. Peta Pemikiran	27
E. Implikasi Teoritis	34
BAB 6 Kesimpulan dan Saran	37
Daftar Pustaka	39

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi politik yang bergulir tahun 1998, organisasi pekerja telah menjadi alternatif politik baru bagi para pekerja dalam menyampaikan aspirasinya. Walau pun masih jauh dari efektif dalam mempengaruhi kebijakan pengupahan, setidaknya lewat organisasi tersebut, para pekerja memiliki peluang luas guna mengartikulasikan ketidakpuasaan dengan kondisi upah kerja yang dinilai terlalu rendah.

Berbagai aksi pemogokan atau demonstrasi pekerja misalnya dapat digolongkan menjadi dua pola, yaitu tuntutan normatif dan tuntutan non normatif. Tuntutan normatif adalah tuntutan yang berkaitan dengan masalah tanggungjawab perusahaan dalam memenuhi ketentuan perundangan seperti upah kerja, masalah berserikat dan insentif lain yang seharusnya menjadi hak pekerja. Sedangkan tuntutan non normatif adalah tuntutan yang menyangkut kerja tambahan (lembur), cuti dan atau libur (sakit) dan pembagian (rotasi) kerja yang umumnya muncul sebagai bentuk kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam perkembangannya, tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang menjadi pemicu munculnya aksi pemogokan atau demonstrasi pekerja. Misalnya, pada bulan Maret 2002, terjadi aksi demonstrasi ribuan pekerja PT. Maspion yang memprotes keputusan perusahaan tentang perubahan jumlah hari kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Dengan berkurangnya satu hari kerja, maka pekerja

akan kehilangan upah dan insentif empat hari kerja/ bulan. Upah empat hari kerja ini bagi para pekerja sangat besar nilainya untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

Aksi demonstrasi ribuan buruh PT. Maspion sangat efektif dalam menekan perusahaan untuk membatalkan keputusan yang dirasa akan merugikan pekerja. Bahkan dalam kasus lain, aksi puluhan ribu pekerja Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan kota-kota lain di depan kantor Gubernur tahun 2001 yang menentang pemberlakuan Kepmentrans No. 78 dan No. 111 Th. 2001 tentang prosedur PHK merupakan titik krusial dalam perjuangan pekerja dalam menuntut hak-hak mereka. Dalam demonstrasi tersebut, puluhan elemen organisasi pekerja dan LSM dari berbagai lintas kepentingan bersatu dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Di Surabaya aksi demonstrasi/ mogok sejumlah organisasi pekerja dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya dapat dikatakan cukup efektif. Terbukti sejak demonstrasi ribuan pekerja tahun 2001 tersebut, pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja bersama-sama wakil-wakil pengusaha dan pekerja menegosiasikan untuk merevisi UMR 2001. Akhirnya, UMR 2001 untuk Surabaya dan kota-kota lain di Jatim mengalami revisi (Surabaya Post, 29-11-2000).

Tabel UMR 2001 di Jawa Timur :

No. Kabupaten/Kota	Lama/Rp/ Bulan	Baru/Rp/Bulan
1. Kota Surabaya	236.000	330.700
2. Kab. Gresik	236.000	330.000
3. Kab. Sidoarjo	236.000	330.000
4. Kab. Mojokerto	236.000	317.200
5. Kota Mojokerto	236.000	317.200
6. Kab. Malang	236.000	300.000
7. Kota Malang	236.000	300.000
8. Kab. Pasuruan	236.000	316.000
9. Kota Pasuruan	236.000	306.800
10. Kab. Probolinggo	236.000	285.000

11. Kota Probolinggo	236.000	290.000
12. Kab. Madiun	212.000	235.000
13. Kota Madiun	212.000	235.000
14. Kab. Kediri	212.000	275.000
15. Kota Kediri	212.000	275.000
16. Kab. Banyuwangi	212.000	232.564
17. Kab. Ngawi	212.000	233.000
18. Kab. Magetan	212.000	233.000
19. Kab. Tuban	212.000	243.800
20. Kab. Jember	212.000	275.000
21. Kab. Sumenep	212.000	220.000
22. Kab. Jombang	208.000	241.280
23. Kab. Situbondo	208.000	241.449
24. Kab. Lamongan	208.000	238.032
25. Kab. Lumajang	208.000	220.500
26. Kab. Ponorogo	208.000	228.800
27. Kab. Tulungagung	208.000	246.000
28. Kab. Bangkalan	208.000	247.775
29. Kab. Nganjuk	208.000	239.200
30. Kab. Bondowoso	208.000	250.000
31. Kab. Bojonegoro	208.000	234.565
32. Kab. Trenggalek	202.000	222.000
33. Kab. Pacitan	202.000	222.000
34. Kab. Pamekasan	202.000	250.000
35. Kab. Sampang	202.000	246.400
36. Kab. Blitar	202.000	233.000
37. Kota Blitar	202.000	233.000

Selanjutnya UMR 2001 direvisi lagi tahun 2002 untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dirasa makin membaik. Berikut ini daftar UMR 2002.

Tabel Upah Minimum Kabupaten/Kota 2002

Kab/Kota	2002/Rp	Kab/Kota	2002/ Rp
1. Kota Surabaya	453.200	22. Kab Pacitan	250.000
2. Kab. Sidoarjo	453.000	23. Kab. Kediri	361.250
3. Kab. Pasuruan	453.000	24. Kota Kediri	361.250
4. Kab. Mojokerto	453.000	25. Kab. Nganjuk	280.000
5. Kota Mojokerto	453.000	26. Kab.	
6. Kab. Malang	443.000	Tulungagung	290.000
7. Kota Malang	443.000	27. Kab.	
8. Kota Pasuruan	375.000	Trenggalek	245.000
9. Kab. Jombang	304.512	28. Kab. Blitar	267.950
10. Kab. Probolinggo	390.000	29. Kota Blitar	273.775
11. Kota. Probolinggo	400.000	30. Kab.	
12. Kab. Banyuwangi	267.500	Bojonegoro	253.750
13. Kab. Jember	315.500	31. Kab. Tuban	280.370
14. Kab. Situbondo	255.481	32. Kab. Lamongan	273.737
15. Kab. Lumajang	260.000	33. Kab. Bangkalan	330.000
16. Kab. Bondowoso	250.000	34. Kab. Sampang	275.000
17. Kab. Madiun	253.800	35. Kab.	
18. Kota Madiun	260.000	Pamekasan	300.000
19. Kab. Ngawi	256.300	36. Kab. Sumenep	295.000
20. Kab. Magetan	260.000	37. Kota Batu	443.000
21. Kab. Ponorogo	252.000		

Dari UMR 2002, terbaca posisi UMR di kota-kota industrial seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan Malang menempati urutan teratas. Sebagai kota industrial dengan tingkat biaya hidup makin tinggi, maka layaklah para pekerja di Surabaya menikmati upah yang makin membaik. Setidaknya, konsep/ teori "rembesan ke bawah" yang didengung-dengungkan ekonom menjadi kenyataan dengan mulai diperhatikannya nasib pekerja yang merupakan asset penting sektor industri. Sebagai catatan, di Surabaya terdapat 146 unit industri besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 75.860 orang, 508 Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja 21.652 orang dan 10.401 unit industri

kecil dengan jumlah tenaga kerja 206.470 orang (Surabaya Dalam Angka Tahun 2000).

Sebagai kota industri, munculnya berbagai organisasi pekerja dari lintas kepentingan adalah hal yang wajar. Menjamurnya organisasi tersebut adalah berkat dari reformasi perburuhan, yaitu dimungkinkannya pekerja untuk membentuk serikat pekerja (SP) di tempat mereka kerja. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menyatakan : (ayat 1) setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selanjutnya (ayat 2) serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Adanya kebebasan dalam membentuk serikat pekerja (SP) tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh para pekerja untuk memperkuat posisi mereka dalam melakukan tekanan pengusaha dan pemerintah guna adanya perbaikan upah kerja. Maka tidak mengherankan kalau suatu unit usaha (pabrik) memiliki lebih dari satu organisasi pekerja dengan corak atau warna kepentingan (politik dan ideologis) yang beragam pula.

Dinamika pekerja di Surabaya ini dapat diukur dari makin banyaknya organisasi-organisasi pekerja yang dideklarasikan 3 tahun terakhir ini. Bermunculannya organisasi pekerja ini menandakan bahwa : 1) mulai muncul kesadaran para pekerja untuk memperjuangkan kondisi upah yang murah ; 2) adanya konsolidasi pekerja untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi pengusaha dan pemerintah di saat perundingan menyangkut upah kerja (<http://www.unisosdem.org/l-umpjakarta.htm>).

Dengan demikian, aktivitasnya organisasi pekerja ini bergiat dibidang penyadaran terhadap pekerja agar sadar akan hak-haknya: memberi pendampingan, advokasi atau pembelaan terhadap para pekerja jika sedang menghadapi perselisihan dengan pengusaha, dan mengorganisasi suatu unjuk rasa atau demonstrasi berkenaan isu-isu upah kerja.

Dari gambaran naik-turunnya upah pekerja dan kecenderungan maraknya aksi demonstrasi pekerja menuntut kenaikan upah kerja, maka sangat relevan sekali kalau diadakan penelitian lapangan guna mengidentifikasi peta empiris organisasi pekerja, warna ideologi pergerakan mereka dan arah afiliasi politik mereka khususnya di Surabaya selama periode 1998-2000.

Dengan demikian, fokus penelitian ini akan membahas: bagaimana peta politik organisasi-organisasi pekerja di Surabaya, apakah mereka mendasarkan perjuangan mereka dengan kepentingan ideologi-politik tertentu atautkah perjuangan mereka cenderung pragmatis yaitu semata-mata sarana memperjuangkan kepentingan ekonomi para pekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Teoritis

Serikat kerja (SP) yang didirikan pekerja di era reformasi saat ini merupakan bentuk "perlawanan" politik mereka atas dominasi pemerintah dalam mengkooptasi kekuatan pekerja yang berlangsung intensif pada era Orba. Era tersebut dianggap merupakan era pengendalian negara atas sektor-sektor sosial politik (parpol, ormas, mahasiswa, pekerja, intelektual, media massa) guna menunjang tingkat stabilitas politik yang tinggi sebagai prasyarat politis keberhasilan pembangunan ekonomi dan industrialisasi.

Asumsi yang melandasi pengendalian negara atas sektor masyarakat tersebut adalah keberhasilan pembangunan ekonomi dan industrialisasi ditentukan oleh adanya stabilitas di bidang politik nasional. Kegagalan era 1950-an dan 1960-an dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan industrialisasi di antaranya disebabkan oleh intensitas konflik partai-partai politik yang begitu parah dan adanya gerakan kedaerahan sehingga kabinet mudah goyah dan runtuh. Konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan terpecah antara persaingan politik elite (konflik vertikal) dengan upaya untuk pemusatan kekuasaan, yang justru hanya menghasilkan ketiadaan stabilitas politik nasional.

Tesis negara Orde Baru (OB) dibangun atas dasar bahwa kegagalan menciptakan stabilitas politik di era 50-an dan 60-an menjadi titik terlemah

pemerintahan multi partai di mana kekuasaan politik terfragmentasi (tersebar) dalam kutub-kutub politik yang cenderung menjauh dari pusat kekuasaan (negara).

Karena itu OB lahir untuk menata kembali tertib politik yang hancur akibat fragmentasi politik masa lalu. Kerangka politik yang melandasi berdirinya OB terkonsentrasi pada tiga sasaran utama.

Pertama, merancang lembaga kepresidenan yang kuat didukung militer sebagai penstabilisator politik nasional. Kedua, dikembangkannya sistem perwakilan kepentingan politik yang hirarkis dimana kepentingan-kepentingan politik masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara dan atau pemerintah. Sistem perwakilan politik hirarkis ini menghasilkan kooptasi negara yang sangat kuat atas setiap aktivitas sosial politik masyarakat. Ketiga, diciptakannya sistem ideologi dominan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya ideologi yang melandasi setiap AD/ART parpol dan ormas

Sektor-sektor sosial dan politik yang dikendalikan negara secara nyata (selain media massa) adalah partai politik dan organisasi kemasyarakatan lewat Undang-Undang No. 3 Th. 1985 tentang partai politik dan Golkar dan Undang-Undang No. 8 Th. 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Dua undang-undang di bidang politik ini menjadi dasar legitimasi politik utama OB untuk menata dan mengendalikan situasi kepolitikan nasional, termasuk legitimasi negara dan pemerintah untuk menyatakan sah dan tidak sahnya suatu partai politik atau ormas.

Lewat undang-undang bidang politik di atas, pemerintah secara sah dapat mengintervensi urusan-urusan internal partai politik dan ormas, seperti soal pimpinan partai atau ormas. Bahkan pemerintah dapat

membekukan/membubarkan partai politik/ormas kalau dirasa bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan/kepentingan pemerintah.

Politik pengendalian OB atas masyarakat ini tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan negara mengontrol konflik politik dalam masyarakat, menghilangkan polarisasi kekuasaan politik yang kontradiktif dengan kepentingan negara dan untuk menghasilkan kooptasi menyeluruh (total) negara atas semua kepentingan sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Efek politik dari kooptasi negara atas masyarakat ini adalah terbatasnya atau berkurangnya keleluasaan masyarakat untuk membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik guna mengartikulasikan kepentingan mereka.

Salah satu asosiasi masyarakat yang mengalami pembatasan ruang geraknya adalah organisasi serikat pekerja (SP). OB memandang SP memiliki potensi konflik politik yang bisa mengoyahkan stabilitas politik lokal dan nasional lewat aksi-aksi mogok kerja dan boikot atas industri tertentu. Pemerintah nampaknya tidak ingin mengulangi pengalaman era kolonial dan era 50-an dimana SP larut dalam kegiatan ideologis baik yang berhaluan radikal (marxis) mau pun yang non marxis (Hadiz 1996 : 72-74).

Karena itu, OB menata agar SP tidak terfragmentasi ke dalam haluan ideologi politik yang bertentangan dengan kepentingan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) tahun 1973 yang merupakan peleburan dari SP-SP saat itu (Hadiz 1996 : 153). Pada tahun 1975 diluncurkan pola Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Pada 1985 FSBI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang diatur dalam pola kemitraan dengan kepentingan negara.

Kuatnya pengendalian negara atas SP ini merupakan ciri korporatisme OB atas SP yang menghasilkan corak hubungan politik yang ; 1). monolitik ; 2). non kompetitif ; 3). dominasi negara.

Adanya perlawanan dari kalangan pekerja untuk mereaksi pengendalian atas SP pelan-pelan mulai bangkit seiring dengan munculnya LSM-LSM yang bergiat di bidang penyadaran pekerja. Karena itu, ada perubahan, SP-SP yang non negara (ingin lepas dari dominasi politik negara) mulai mengintensifkan diri dalam bentuk gerakan-gerakan pekerja merupakan bentuk agregasi kepentingan pekerja yang diorganisasi secara formal dengan landasan, tujuan dan misi politik untuk mempengaruhi kebijakan perburuhan di Indonesia.

Gerakan pekerja ini bisa menjadi gerakan sosial jika kondisi-kondisi politik seperti perasaan tertekan, frustrasi dan tereksplorasi oleh kekuatan luar (kekuatan industri dan pemerintah) mempengaruhi kesadaran kolektif para pekerja. Ketiga kesadaran kolektif ini menjadi acuan awal bagi terbentuknya kepentingan-kepentingan yang lebih ideologis yang nantinya akan mempengaruhi corak aktivitas politik mereka.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang menyebabkan suatu "tekanan" yang datang dari para pekerja bisa menjadi gerakan soaial (C.A. Dawson and W.E. Gety) yaitu ;

- Unrest : Suatu gerakan sosial muncul setelah berkembang kesadaran kolektif diantara anggota kelompok menyangkut keadaan struktur sosial yang dirasa timpang, eksploitatif dan menekan.

- Excitement : Adanya struktur yang dirasa timpang mengarah pada terbentuknya sikap-sikap agresif guna mereaksi tatanan yang timpang.
- Formalization : Adanya perubahan dari kesadaran ide-ide kolektif yang laten berkembang menjadi formalisasi gerakan sosial lewat aktivitas organisasi dengan tujuan, misi dan vested interes yang lebih jelas.
- Institutionalization : Muncul rasionalisasi politik dan kepentingan yang lebih ideologis dimana arah gerakan sosial lebih terfokus guna melakukan bargaining dengan kekuatan luar.
- Dissolution : Pendesakan tujuan dianggap telah berhasil dengan dipenuhinya tuntutan-tuntutan gerakan sosial.

Dengan demikian pilihan teoritis untuk menganalisis pekerja sangat relevan dengan menggunakan teori gerakan sosial. Sebab dalam kenyataannya, organisasi pekerja acapkali bersifat radikal dengan tidak sekedar tuntutan mereka bersifat ekonomi seperti kenaikan upah tapi terkadang juga politis seperti mempengaruhi keputusan (policy) pemerintah (Duverger 1987). Pekerja juga mempengaruhi sistem pengupahan dan meminta agar diberi ruang berserikat secara lebih bebas. Dalam dimensi politis, aktivitas pekerja berpotensi mempengaruhi distribusi sumber-sumber ekonomi.

Seperti dikatakan Ted Gurr, untuk melihat apakah suatu gerakan sosial seperti gerakan pekerja merupakan gerakan sosial yang melembaga atau tidak, dapat diukur dari beberapa kriteria berikut (Gurr, 1986).

- Adanya kepentingan ideologis yang secara longgarmengikat kesadaran kolektif massa.
- Adanya faktor-faktor psikologis-sosial seperti sentimen-sentimen terhadap keadaan yang dirasa tidak ada/timpang.
- Adanya struktur internal gerakan sosial yaitu distribusi kekuasaan atau kewenangan dalam gerakan sosial itu seperti kepemimpinan dan anggota.
- Adanya strategi gerakan, yaitu fungsi gerakan sosial sebagai reaksi politis atas tatanan yang dirasa timpang dan tidak adil sehingga aktivitas gerakan sosial dilihat sebagai saluran guna mempengaruhi kehidupan politis.

Dalam studi Ilmu Politik, gerakan pekerja dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial dan politik karena sifat gerakannya mereaksi struktur politik yang dirasa oleh para pekerja tidak adil dan terlalu mengeksploitasi tenaga buruh. Dalam konteks ini, gerakan pekerja berfungsi sebagai gerakan sosial yang bertujuan memperjuangkan nilai-nilai kesadaran kelas (Hadiz, 1996). Dalam konteks yang lebih politis, gerakan pekerja bahkan mereaksi secara radikal sistem politik yang dianggap otoriter, represif dan tidak memberikan kebebasan berasosiasi.

Dalam rangka gerakan pekerja di Indonesia, lahirnya gerakan pekerja di era reformasi ini dapat dikatakan sebagai reaksi atas tatanan politik yang teknokratis dimana kebijakan pemerintah tentang perburuhan (pekerja) cenderung mengasingkan mereka dari proses politik nasional riil. Pekerja hanya dilihat

sebagai komoditas ekonomi yang harus tunduk pada kepentingan dan keputusan politik penguasa. Karena itu, pengorganisasian organisasi pekerja merupakan bentuk "perlawanan" terhadap hegeomoni politik atas pekerja yang dirasa mengembangkan regime otoriter dan karena itu menjadi sasaran perubahan.

B. Batasan Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh, Bab I Pasal 1 yang dimakmud dengan :

- Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Serikat Kerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan mau pun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- Pengusaha adalah orang perorangan, perusahaan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya atau yang berkedudukan di Indonesia.
- Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum (Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Th. 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Penelitian ini bertujuan untuk ;

- Mendiskripsikan bagaimana peta pluralisme organisasi-organisasi pekerja di Surabaya yang makin bermunculan sebagai konsekuensi reformasi sistem politik.
- Mendiskripsikan apakah organisasi pekerja memiliki aspirasi ideologi politik sebagai basis perjuangan mereka

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang deskriptif yaitu berupaya menjelaskan suatu fenomena sosial, maka kontribusi penelitian ini akan berupa :

- Penyediaan informasi menyangkut masalah-masalah perburuhan sehingga akan menambah kajian yang telah ada.
- Pengembangan konsep ilmu politik yang berkaitan dengan partisipasi dan gerakan politik khususnya organisasi buruh di tingkat lokal.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Bentuk atau Model Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kajian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu berupaya memaparkan secara fakta-fakta sosial seputar aktivitas sosial politik organisasi-organisasi pekerja, afiliasi ideologi mereka dan kepentingan politik mereka.

B. Tehnik Koleksi Data

Ada dua model tehnik koleksi data yang akan digunakan :

1. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara secara mendalam terhadap aktivis/tokoh organisasi pekerja. Hasil wawancara ini merupakan data primer.

2. Sumber informasi sekunder berupa arsip, penerbitan, dokumen dan kepustakaan lain yang relevan dengan sasaran penelitian ini.

C. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnis penarikan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu mewawancarai kalangan aktivis/tokoh organisasi pekerja (SPSI, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Sarbumusi, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang ada di Surabaya. Sekaligus, para aktivis/tokoh organisasi pekerja tersebut dijadikan sebagai responden penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai urgensi/relevansi penelitian yaitu data dari aktivis/tokoh/informan kunci, data dari pekerja/anggota organisasi pekerja yang bersangkutan dan data dari hasil kepustakaan. Data yang relevan dijadikan acuan dan dianalisis secara teoritis sesuai tujuan penelitian.

E. Cara Penafsiran Dan Penyimpulan Hasil Penelitian

Penafsiran penelitian dan penyimpulan hasil penelitian berdasarkan masukan data awal dari koleksi data yang telah diklasifikasikan sesuai teknik analisa data. Selanjutnya dilakukan pengembangan analisis teoritis atas data yang ada dan dari hasil analisis tersebut dirumuskan pokok-pokok pemikiran (hight light) sebagai dasar penyusunan kesimpulan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH SINGKAT BURUH DI INDONESIA

Sejarah pergerakan perburuhan di Indonesia dapat dilacak dari perjalanan pergerakan kebangsaan (nasionalisme) menentang kekuasaan kolonial Belanda pada awal akhir abad 19 dan menjadi makin kuat pada awal abad 20. Konteks kelahiran gerakan buruh yang dilandasi semangat anti-kolonial menempatkan gerakan buruh pada posisi yang sejajar secara politik dengan semangat anti-kolonial yang dikembangkan partai-partai politik.

Bahkan dapat dikemukakan gelombang perlawanan buruh terhadap kekuasaan kolonial Belanda sebetulnya sebetulnya sudah dimulai pada 1870 an semenjak Belanda mengetrapkan kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) tahun 1830 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanam Paksa ini adalah kebijakan pemerintah Belanda untuk memobilisasi secara besar-besaran massa rakyat petani di Hindia Belanda untuk bekerja dan menanam komoditas ekspor yang sangat diperlukan Belanda sebagai sumber pemasukan kas kerajaan (Djuliati, 2000 : 104).

Era tanam paksa ini merupakan era dimana perusahaan Belanda, baik perusahaan swasta mau pun perusahaan negara membuka lahan-lahan perkebunan seperti kopi, tea plantation, gula, kayu dan bahkan pertambangan (Djuliati: 2-5). Makna dari kehadiran tanam paksa adalah liberalisasi ekonomi, dimana komoditas dibagi menjadi dua bagian, yaitu komoditas alam (hasil perkebunan) dan komoditas buruh sebagai penopang proses produksi tanam

paksa. Perkembangan liberalisasi ekonomi ini menjadi awal dimana dikenal buruh bergaji (*wage-labor*) di Indonesia era kolonial.

Organisasi buruh yang tercatat sebagai penopang ekonomi perkebunan saat itu adalah organisasi buruh rel kereta api didirikan tahun 1908 (Hadiz, 1996: 78). Perkembangan berikutnya, adalah organisasi buruh di sektor pertambangan, guru, aparat administrasi pemerintah kolonial dan buruh pegawai pegadaian yang didirikan tahun 1916. Warna agama juga mendominasi gerakan buruh, misalnya Serikat Islam (SI) mendapat dukungan cukup besar di kalangan petani dan buruh perkotaan. Warna yang lebih ideologis, dijumpai pada ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) yang beraliran sosialis yang kemudian menjadi cikal-bakal PKI. ISDV ini mengklaim mewakili unsur proletariat, yaitu kaum buruh yang secara ekonomi dan politik tertindas oleh sistem kapitalisme.

Secara tematik, gerakan buruh di era kolonial memberi impresi pada semangat anti-kolonial, baik yang diwacanakan oleh gerakan buruh yang berafiliasi pada partai politik mau pun yang tidak berafiliasi pada partai. Adanya persamaan kepentingan politik ini membuat gerakan buruh cenderung dinilai pemerintah kolonial Belanda sebagai gerakan bisa membayakan posisinya. Contohnya pada aksi pemogokan besar-besaran serikat buruh pegadaian yang dipimpin Abdul Muis dari CSI (Central Serikat Islam), yaitu serikat kerja dibawah naungan SI. PKI mendukung pemogokan tersebut sehingga Belanda melakukan memecatan terhadap pegawai yang ikut mogok (Ricklefs, 1993 : 266).

Kenyataan bahwa beberapa partai politik di era kolonial turut "membidani" atau memiliki *underbouw* pada organisasi buruh, menunjukkan adanya keseriusan mereka untuk menjadikan isu buruh sebagai isu populis di tengah

masyarakat yang mayoritas struktur okupasinya bercorak buruh agraris. Kenyataan sosiologis ini nampaknya berhasil dimanfaatkan secara baik oleh PKI, PNI, Sosialis dan Masyumi guna meraih simpati masyarakat pekerja.

Peta afiliasi politik organisasi buruh paska kolonial (1945) relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di era multi partai (1950-an) organisasi buruh makin intensif melakukan sosialisasi penyadaran hak-hak berserikat tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat (*equal right to form labor union*). Munculnya banyak organisasi buruh yang memiliki hubungan secara vertikal dengan partai-partai ini makin membuat masyarakat terbelah ke dalam wilayah pasar politik yang rumit antara isu ideologi, agama, kekuasaan dan kepentingan elite. Kenyataan politik ini menyebabkan peta konflik politik tidak murni berjalan sendiri. Isu buruh dan upah kerja misalnya, acapkali tumpang tindih (*cross-cutting in shape*) dengan isu-isu politik yang diperjuangkan partai. Isu Buruh dengan demikian, menampilkan dua wajah sekaligus, wajah ekonomi (upah) dan wajah politik (perebutan pengaruh).

Berikut ini sejumlah partai politik paska kolonial yang memiliki hubungan afilatif dengan sejumlah organisasi buruh (Hadiz : 98).

Organisasi :	Afiliasi :	Anggota :
SOBSI	PKI	2.733.000
KBSI	PSI	376.000
SBII/GASBINDO	MASYUMI	600.000
KBKI	PNI	1.002.000
HISSBI	PARTAI BURUH	261.000
SOBRI	MURBA	281.000
SARBUMUSI	NU	12.000

GOBSII	PSII	1.000
GSBI	PNI	145.000
KBIM	MASYUMI	42.000
O.B. PANTJASILA	PARTAI KATOLIK	61.000
SKBI	PARKINDO	Tak tercatat

Seiring makin sengitnya persaingan ideologi partai-partai di tingkat nasional, pergerakan buruh juga makin ideologis dalam mencari simpati massa. Isu buruh yang menjadi isu strategis tahun 1960-an tumpang tindih dengan isu kekuasaan, menjadi salah satu faktor yang turut memicu konflik-konflik kelas dalam masyarakat Indonesia. Apalagi "kelas" identik dengan marxisme (PKI) membuat organisasi buruh yang berafiliasi pada agama (Islam) makin keras menentang kehadiran organisasi buruh yang bercorak marxis. Pengerasan ini terjadi antara SOBSI (afiliasi dengan PKI) VS Non-SOBSI (Non Marxis) menjelang dan sesudah peristiwa Cou'p tahun 1965. Banyak anggota atau simpatisan SOBSI ditangkapi atau diminta membubarkan organisasi mereka. SOBSI sebagai organisasi buruh berhaluan marxis radikal menghadapi tekanan yang berat dan ancaman pembubaran seiring dugaan keterlibatan PKI dalam peristiwa percobaan cou'p tahun 1965 yang menewaskan sejumlah jenderal militer.

Dalam perkembangan organisasi buruh, paska 1965 menjadi titik balik sejarah pergerakan buruh di Indonesia. Organisasi buruh non-SOBSI dan sejumlah federasi buruh lainnya mendesak pemerintah untuk membekukan atau membubarkan PKI dan ormas-ormas buruh yang berada di bawah garis politiknya.

Peluang politik ini segera disambut oleh pemerintah dan militer lewat kampanye besar-besaran untuk membubarkan PKI dan ormas pendukungnya serta menempatkan mereka sebagai organisasi terlarang.

Tingginya semangat anti PKI ini dimanfaatkan pemerintah untuk mensponsori lahirnya KNPI (Komite nasional Pemuda Indonesia) yang mewakili kelompok ormas pemuda, petani (HKTI), nelayan (HNSI). Lahirnya konfederasi ini dipandang sebagai bentuk awal peran pemerintah dan militer untuk menciptakan model organisasi asosiasional yang monolitik, non-kompetitif dan dibawah kendali militer. Pengorganisasi oleh pemerintah (*state-sponsorship*) terhadap organisasi buruh dibawah satu atap kendali pemerintah ini menjadi cikal-bakal lahirnya FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) yang diresmikan tahun 1973.

Kebijakan perburuhan era awal Orde Baru (OB) menurut King (King 1979 :185) berkaitan dengan pilihan model pembangunan ekonomi liberal yang dipilih OB, yaitu model pembangunan kapitalistik yang teknokratis. Model ini mengasumsikan, keberhasilan pembangunan ekonomi (pertumbuhan) sangat bergantung pada cara bagaimana OB menata stabilitas politik nasional. Segmen-segmen partai dan organisasi-organisasi massa dan buruh yang dianggap kontra produktif dengan stabilitas politik OB, diawasi secara ketat lewat pengontrolan negara secara politik dan ideologis. Kebijakan pengontrolan politik ini dikenal dengan istilah korporatisme (*state-corporatist regime*).

Lewat kebijakan pengontrolan ini pemerintah dan militer dapat mengawasi, membubarkan dan mengangkat kandidat-kandidat organisasi-organisasi sosial politik termasuk buruh, media massa, partai dan kelompok kepentingan profesi yang direstui pemerintah. Tujuan pengontrolan korporatis ini adalah menjinakkan

potensi konflik sosial dalam masyarakat, yang di masa 50-an dan 60-an dimotori oleh konflik-konflik partai dan radikalisme buruh.

Imbas dari kebijakan korporatisme bagi gerakan buruh adalah adanya pemaksaan dari pihak pemerintah untuk mempromosikan FSBI (1973) yang kemudian diubah namanya menjadi SPSI (1985) sebagai satu-satunya organisasi buruh / pekerja yang sah bagi seluruh buruh di Indonesia. Artinya tidak ada organisasi buruh yang boleh berdiri selain yang disponsori pemerintah.

B. REFORMASI PERBURUHAN : Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja / Serikat Buruh

Sejarah pergerakan buruh di Indonesia berubah secara mendasar tatkala krisis ekonomi tahun 1997 yang kemudian diikuti dengan munculnya krisis politik menghasilkan perubahan kekuasaan dari OB ke pemerintahan reformasi dalam tahun 1998. Faktor perubahan regime ini merupakan faktor kunci yang menelorkan perubahan-perubahan di bidang politik dan hukum yang lebih luas.

Ada dua isu politik yang langkah pemerintahan baru saat itu. Pertama, pemerintahan presiden BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto yang mundur akibat desakan publik dan tidak adanya dukungan elite-elite sipil dan militer, segera menyatakan dukungannya atas lahirnya sistem multi partai. Kedua, janji pemerintah baru mencabut berbagai regulasi politik terutama produk perundang-undangan politik kepartaian dan keormasan, yang dijadikan alat represi dan pemberangusan kebebasan berserikat dan ekspresi.

Sebagai respon atas desakan publik yang menuntut ruang kelembagaan dan partisipasi politik lebih luas dari masa sebelumnya adalah ditetapkanlah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam UU ini warga negara dijamin secara bebas boleh menyampaikan pendapat di muka umum sesuai prinsip-prinsip demokrasi (pasal 2). Implikasi politik dari pasal tersebut adalah setiap warga negara baik perorangan mau pun kelompok dapat mengekspresikan derajat kebebasannya dengan lewat aksi-aksi demonstrasi.

Langkah berikutnya yang turut mempercepat terjadinya reformasi mendasar di bidang kebebasan politik sipil adalah disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Dengan ditetapkan dan diakuinya UU tersebut, maka peluang sipil (rakyat) untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya seperti hak hidup, keyakinan, perlindungan hukum dan hak kebebasan pribadi, nurani dan pikiran menjadi terbuka dan mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan mendasar juga terjadi semenjak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberi dasar bagi munculnya sistem multi partai di Indonesia.

Berkaitan dengan aspek reformasi perburuhan, pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Buruh. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah mengakui adanya keberagaman dalam serikat buruh yang merupakan saluran aspirasi buruh. Konsekuensi politik dari muncul banyak serikat buruh adalah klaim SPSI sebagai satu-satunya wadah buruh menjadi tidak berlaku lagi. Kini buruh makin mudah



membentuk serikat kerja mereka sendiri sesuai kepentingannya asal didukung sekurang-kurang 10 buruh / pekerja (pasal 5 ayat 1 dan 2).

Dengan demikian benang merah yang menandai perbedaan antara regime politik (hukum dan perundangan politik) OB dengan pasca OB terletak pada cara bagaimana sejumlah produk perundang-undangan hukum dan politik dijadikan instrumen represi kebebasan politik. Hukum dan undang-undang politik produk OB lebih diandalkan sebagai alat represi atas masyarakat politik yang diasumsikan berpotensi menjadi pusat-pusat konflik sosial politik yang akan membahayakan kesinambungan kebijakan regime. Karena itu, partai, ideologi partai non-negara, ormas dan buruh mendapat represi yang hebat dari OB.

Dengan munculnya regulasi hukum dan politik yang berderajat demokratis, pergerakan buruh di Indonesia makin bebas dan terbuka mengekspreskan kepentingannya. Pola hubungan antara negara / pemerintah atas buruh yang semula dominatif dan korporatis telah putus dan sebagai gantinya mulai muncul gerakan-gerakan penguatan (*empowerment*) jaringan-jaringan akar rumput (*grass-root*) buruh yang makin mendapat tempat di kalangan buruh.

Disahkannya 4 undang-undang yang memberi jaminan adanya ruang berdemokrasi lebih luas bagi masyarakat sipil di atas merupakan political setting yang mewarnai dinamika (tumbuh dan berkembangnya) gerakan-gerakan buruh. Hal ini berarti, legitimasi gerakan buruh yang memiliki beragam latarbelakang kelembagaan guna memformulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan ideologi semakin bebas.

C PLURALITAS ORGANISASI PEKERJA DI SURABAYA

Dampak reformasi politik memberikan pengaruh yang cukup mendasar bagi munculnya organisasi-organisasi pekerja di Surabaya. Dari perkembangan yang ada, jumlah organisasi pekerja atau organisasi/ forum yang mengkritisi masalah pekerja tercatat 23 organisasi/ forum, yakni :

- Kerukunan Pekerja Katolik,
- Serikat Buruh Regional (SBR),
- Serikat Buruh Kerakyatan (SBK),
- SP TSK Victory Long Age,
- Serikat Buruh Garmen Mandiri,
- Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Jatim,
- Serikat Buruh Kartini (SB Kartini),
- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia,
- Serikat Buruh Industri Kapal Indonesia (SBIKI)
- Persatuan Buruh Indonesia (Perburin),
- Serikat Pekerja Bank of Tokyo-Mitsubisi (SP BOTM),
- Kelompok Kerja Humanika,
- Yayasan Arek,
- Kelompok Belajar Sosialis,
- Divisi Buruh LBH Surabaya
- Pastoral Pendampingan Buruh Keuskupan Surabaya,
- Lembaga Advokasi Perburuhan Yayasan Adhikara Indonesia,
- Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI),

- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,
- Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI R),
- Serikat Kerja Muslimin Indonesia (Sarbumusi),
- Serikat Pekerja Muslimin Indonesia,

Selain 23 organisasi pekerja yang secara eksplisit memperjuangkan nasib pekerja, yaitu dilihat dari penggunaan nama "pekerja" dalam organisasi mereka, juga terdapat beberapa organisasi pekerja atau forum yang mengkritisi serta bersimpati dengan nasib pekerja. Organisasi-organisasi yang bersimpati dengan nasib pekerja di antaranya adalah Pusham Ubaya, Komunitas SaRa, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI Jatim), Yayasan Arek Lintang, Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen.

Organisasi-organisasi serta forum yang memperjuangkan nasib pekerja ini pada bergabung dalam Komite Aksi Satu Mei, yang secara internasional diperingkati sebagai hari buruh sedunia. Sedangkan Komite Satu Mei di Surabaya ini merupakan aksi penggalangan opini publik yang tujuannya adalah mengkritik praktek-praktek ketidakadilan kebijakan perburuhan pemerintah. Kebijakan perburuhan yang dinilai tidak adil di antaranya UU No. 25 / Th. 1997 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 / Th. 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Dua produk UU ini di anggap memasung hak-hak pekerja dan cenderung menempatkan pekerja pada posisi tawar yang sangat lemah dalam berurusan dengan pengusaha dan pemerintah.

Selain terdapat Komite Aksi Satu Mei, di Surabaya juga terbentuk Dewan Buruh Surabaya / Jatim yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi

pekerja, di antaranya Serikat Buruh Regional, SB Kerakyatan, SP Pariwisata Reformasi Jatim, SB Garmen Mandiri, SB Kartini, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, SP PT Pos Jemur Andayani, SB Industri kapal Indonesia, LBH, Kelompok Kerja Humanika, Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum, Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen, Front Perjuangan Pemuda Indonesia dan Komunitas SaRa.

D. PETA PEMIKIRAN/IDEOLOGI POLITIK ORGANISASI PEKERJA

Dari hasil perbincangan dengan tokoh/aktivis pekerja ide atau pemikiran yang mengemuka dalam memperjuangkan nasib pekerja adalah sistem penetrasi kapital yang ejawantahannya pada dunia industri yang tidak memihak pada kalangan pekerja/buruh. Posisi pekerja/ buruh di Indonesia umumnya masih rendah karena pekerja /buruh dianggap sebagai alat produksi yang bisa dieksloitasi tenaga kerjanya tanpa imbalan upah kerja yang layak/ memadai dan manusiawi.

Sorotan terhadap nasib pekerja/ buruh yang dieksplotasi secara fisik dan ekonomi ini pada akhirnya menghasilkan model pemikiran organisasi pekerja yang kritis dan radikal di era reformasi saat ini. Mereka kritis terhadap segala aspek kebijakan perburuhan yang dibuat atau sedang dibahas di tingkat lembaga politik (DPR) yang dinilai tidak adil, diskriminatif, dan hanya menguntungkan kalangan klas pengusaha serta pemerintah. Bahkan mereka menempatkan posisi pengusaha dan pemerintah sebagai klas borjuis (kapitalis) dan agen kapitalis yang dalam pengertian teori strukturalis memiliki keunggulan-keunggulan ekonomi dan politik untuk membenarkan adanya eksploitasi fisik dan non fisik atas

dunia pekerja/ buruh lewat berbagai perangkat UU yang juga menggambarkan kepentingan kedua klas tersebut.

Terdapat dua organisasi pekerja/buruh yang berandangan kritis terhadap kebijakan perburuhan yaitu Serikat Buruh Rakyat dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokrasi (PRD). Pandangan politis dua organisasi pekerja/ buruh terhadap nasib buruh dapat dikemukakan sebagai berikut :

Persoalan ketenagakerjaan sendiri tidak lepas dari suatu sistem kapitalisme internasional yang diproteksi oleh kepentingan negara demi mengapai kemakmuran regime kapitalisme Orde Baru (OB). Negara OB menjalankan kepentingan ekonomi dan politik regime-regime kapitalisme internasional baik berjud IMF, Bank Dunia mau pun WTO. Mengapa ?

Dalam tata ekonomi dunia yang menyatu dalam kapitalisme internasional saat ini, posisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sangat lemah. Indonesia membutuhkan dana segar lewat investasi domestik dan asing guna memperbesar pertumbuhan kue ekonominya. Keberhasilan pembangunan OB pada akhirnya diukur dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi per tahun (rata-rata di atas 5 per sen)/ tahun. Adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan instrumen dasar legitimasi politik dan ideologis orde pembangunanisme OB yang tidak boleh dibantah dan dikritik oleh masyarakat.

Sedangkan untuk mengamankan orde pembangunanisme ini diterapkan kebijakan stabilitas politik otoriter yang dampak politisnya mengurangi kebebasan dan partisipasi politik masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsekuensinya, keputusan politik pembangunan dibuat secara

tehnokratis dan *top down* dimana prakarsa daerah/ lokal serta masyarakat terbatas. Pemerintah pun membedakan antara sumber-sumber potensi sosial politik yang dapat mengancam stabilitas nasional dalam rangka proses dan pelaksanaan pembangunan dengan sumber-sumber politik tertentu yang dapat membahayakan stabilitas politik nasional. Partai politik di luar Golkar ("oposisi"), buruh, ormas, pers dan intelektual umumnya dikategorikan sebagai sumber potensi ancaman karena pandangan-pandangan mereka yang kritis terhadap pemerintah. Pemerintah OB pun mengetrapkan kebijakan pengendalian politik terhadap partai politik (UU No. 3/1985 tentang Asas Tunggal Pancasila) dan mengatur keberadaan organisasi-organisasi profesi di antara pekerja/ buruh (satu ormas pekerja yang sah yaitu SPSI).

Khusus pada sektor pekerja/ buruh, pemerintah menerapkan kebijakan politik ketenagakerjaan yang tujuannya mengendalikan aktivasi politik pekerja/ buruh agar pekerja/ buruh tidak menjadi unsur yang membahayakan hubungan industrial di Indonesia. Karena itu pemerintah hanya mengakui SPSI sebagai wadah saluran aspirasi pekerja/ buruh di Indonesia. Bentuk pengendalian ini berupa keorganisasian dimana pemerintah menunjuk/merestui ketua umum SPSI dan bentuk pengendalian yang politis berupa campur tangan pemerintah dan aparat militer dalam setiap perselisihan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha.

Oleh kalangan aktivis pekerja/ buruh, SPSI dianggap tidak representatif bagi kepentingan pekerja/ buruh karena SPSI cenderung menyuarakan kepentingan pemerintah dan pengusaha. Kebijakan politik ketenagakerjaan/ perburuhan yang melarang berdirinya wadah organisasi pekerja/ buruh ini erat kaitannya dengan paradigma model pembangunan ekonomi OB yang meletakkan

aspek stabilitas politik sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Kongkritnya, investasi domestik mau pun asing yang diandalkan menjadi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi membutuhkan jaminan keamanan sosial dan politik (stabilitas politik), termasuk jaminan politis bagi tidak adanya gejolak-gejolak sosial pekerja/ buruh.

Dalam konteks teoritis, kecenderungan munculnya pengendalian pemerintah atas sektor-sektor sosial politik seperti partai politik, pers, pekerja/ buruh dan organisasi-organisasi profesi lainnya ke dalam pengaruh pemerintah merupakan bentuk lahirnya negara birokrasi otoriter (*bureaucratic authoritarian model*) sebagaimana dikemukakan Dwight Y. King (King : 1982, 109-111). Menurut model tersebut, negara OB tipikal mewakili ciri-ciri negara birokrasi otoriter karena OB menerapkan kebijakan politik pembatasan keberagaman sosial politik (*limited pluralism*). Pluralisme terbatas ini intinya adalah

1. pemerintah membatasi aktivasi kelompok-kelompok kritis
2. dominasi pemerintah yang kuat dan stabil kelompok-kelompok sosial kritis yang muncul selama proses modernisasi
3. dalam proses modernisasi, pengambilan keputusan ekonomi politik OB berada di tangan oligarki atau militer
4. untuk menjadi stabilitas politik yang mampu mengamankan pembangunan, diterapkan *depoliticalization*, *de-party-ization* dan *floating mass*. Tiga kebijakan politik ini intinya adalah memotong sumber-sumber ancaman politik dari tingkat massa yang dapat membahayakan proses pembangunan nasional.

Dengan demikian, kebijakan makro di bidang perburuhan di Indonesia era OB adalah respon militer dan tehnokrat guna mengeliminir potensi-potensi destabilisasi politik yang dianggap dapat membahayakan proses modernisasi sosial ekonomi. Artinya, represi pekerja/ buruh oleh pemerintah merupakan konsekuensi politik dari model negara birokrasi otoriter guna mengamankan modal ekonomi nasional (investasi domestik dan asing) yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Adalah menarik kalau kecenderungan otoriter dalam kebijakan perburuhan dikaitkan fenomena akhir OB pada saat krisis ekonomi 1997 lalu. Para aktivis pekerja/ buruh berpendapat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan kegagalan dari model pembangunan ekonomi OB yang dibuat secara tehnokratis dan hanya menguntungkan kalangan pengusaha besar (konglomerat) yang mendapat proteksi pemerintah. Mereka inilah yang menikmati sebagian besar kue pertumbuhan ekonomi, sedangkan rakyat yang jumlahnya mayoritas hanya menerima sebagian kecil "tetesan" kue pertumbuhan. Realitas politik demikian membuat para pekerja/ buruh makin agresif dalam menyoroti ketidakadilan hubungan industrial, termasuk mereka makin berani menggalang aksi mogok guna menuntut kenaikan pah kerja yang lebih layak.

Adanya krisis ekonomi 1997, tumbangnya negara OB dan reformasi politik 1998 yang memunculkan pluralisme sosial kepartaiaan, dipandang kalangan aktivis memberi peluang bagi munculnya gerakan politik pekerja/ buruh di Indonesia. Konsekuensi politik berikutnya adalah gerakan pekerja/ buruh bermunculan setelah sekian lama dilarang/dibatasi aktivitas perjuangannya. Sekitar 29 serikat pekerja/ buruh yang berbasis nasional yang muncul 4 tahun

terakhir ini setidaknya merupakan indikasi kecenderungan adanya kebangkitan kelas pekerja/ buruh.

Para aktivis umumnya berpendapat, peluang bebasnya mendirikan serikat pekerja/ buruh di era reformasi merupakan kemajuan yang luar biasa dibanding pada masa OB dimana sangat sulit bagi pekerja/ buruh untuk membawa gerbong kepentingan mereka keluar dari isu-isu ekonomi ke isu gerakan yang lebih politis. Dengan keadaan yang berbalik total, saat ini para pekerja/ buruh yang tergabung dalam wadah afiliasif memiliki kesempatan untuk menaikkan posisi tawar mereka dengan pengusaha dan pemerintah menyangkut isu-isu upah kerja.

Misalnya, isu yang dikedepankan FNPBI yang memandang isu pekerja/ buruh merupakan isu politik yang layak diperjuangkan karena mereka merupakan kelas ekonomi yang tertindas akibat sistem kapitalisme. Dengan isu yang cukup radikal, FNPBI menyoal "pembebasan" pekerja/ buruh dari sistem kapitalisme yang menindas rakyat. Misi perjuangan yang dikedepankan adalah soal penyadaran kelas buruh dari sistem yang menindas itu sendiri. Wadah yang tepat untuk menciptakan kesadaran kelas demikian adalah wadah organisasi pekerja/ buruh yang mengakar di tingkat dunia pekerja / buruh.

Dasar perjuangan FNPBI yang radikal dalam memperjuangkan nasib pekerja / buruh bukan karena FNPBI berada di bawah anungan PRD, tetapi karena rasionalisasi mereka yang mendasarkan apada asumsi bahwa sistem produksi material yang berbasis pada sistem kapitalisme *inheren* dengan eksploitasi pengusaha yang mendapat legitimasi politik penguasa politik. Karena itu, adanya represi pekerja/ buruh oleh negara pada dasarnya adalah produk dari

relasi antara kekuasaan politik lewat elite politiknya dan kekuasaan ekonomi (pengusaha).

Pilihan pada sistem kapitalisme ini menyebabkan sistem ekonomi Indonesia dikuasai oleh regime kapitalisme domestik dan asing yang mendapat proteksi oleh kelas penguasa politik OB. Proteksi politik ini kemudian menimbulkan budaya upeti dan suap (rente) yang menjadi akar terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Pandangan yang sama juga dikemukakan aktivis SBR, bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia tak terlepas dari konsekuensi terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan sistem kapitalisme global. Ketika krisis moneter melanda Korsel dan Thailand, posisi Indonesia sudah diambang kehancuran karena *rush* rupiah oleh masyarakat yang kuatir simpanan mereka di bank-bank konglomerat tidak dapat ditarik. *Rush* ini salah satu pemicu terjadi krisis ekonomi yang oleh aktivis SBR dikaitkan dengan ekonomi rente yang melibatkan pengusaha dengan elite politik.

Praktek ekonomi kapitalisme dalam kenyataannya memberi peluang adanya eksploitasi ekonomi oleh pengusaha dan pemerintah (penguasa politik) terhadap pekerja/ buruh. Pekerja/ buruh yang tereksplorasi ini perlu disadarkan hak-hak politiknya melalui proses "pendidikan politik" berupa diskusi-diskusi yang mengkritisi aspek-aspek politik dan ekonomi yang menyebabkan makin terpuruknya nasib pekerja.

Pemikiran politik yang kritis terhadap kondisi pekerja/ buruh ini merupakan konsekuensi logis dari ide-ide demokrasi sosial, keadilan sosial dan solidaritas sosial yang nampaknya menjadi roh perjuangan SBR. Hal senada juga

dilihat dari ide FNPBI yang megnedepankan ide demokrasi sosial yang menentang eksploitasi kelas.

Main stream gerakan pekerja/ buruh pada dasarnya adalah bagaimana menciptakan proses kesadaran kelas di kalangan pekerja/ buruh. Hanya saja pendekatan mereka agak berbeda terutama dalam merefleksikan isu-isu tertentu. Bagi aktivis FNPBI dan SBR refleksi mereka kuat pada paradigma eksploitasi ekonomi dan politik kelas yang berkuasa (elite dan pengusaha) atas pekerja. Karena itu, aktivitas gerakan pekerja bukan saja persoalan ekonomi, misalnya menyoal upah kerja saja, tetapi harus mampu menjelaskan dan mencari alternatif sistem hubungan industrial yang bebas dari eksploitasi.

Tawaran/alternatif yang ditawarkan adalah :

- pemerintahan yang demokrasi sosial
- menghapus intervensi politik militer dalam kasus-kasus pekerja
- menciptakan undang-undang serikat kerja yang egaliter
- menempatkan pekerja/ buruh subjek dan bukan objek produksi
- upah kerja yang setiap saat dikoreksi mengikuti kenaikan tingkat kebutuhan hidup pekerja/ buruh.

E. IMPLIKASI TEORITIK

Gerakan pekerja/ buruh yang muncul d era reformasi dapat dikategorikan sebagai kekuatan alternatif politik bagi kalangan pekerja/ buruh dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Dengan model gerakan mereka yang kritis dan reaktif terhadap masalah-masalah ketidakadilan pekerja, mereka pada dasarnya mampu mengubah corak pergerakan mereka dari yang berbasis

ekonomi ke gerakan yang lebih politis. Artinya, mereka dapat menjadi gerakan *counter politics* terhadap pemerintah yang dinilai gagal atau tidak adil dalam mengetrapkan kebijakan perburuhan.

Di era OB, gerakan pekerja/ buruh lebih memilih model gerakan bawah tanah (*klandestien*) karena beberapa alasan :

- adanya represi politik atas gerakan pekerja/ buruh
- intervensi militer
- penangkapan aktivis pekerja/ buruh yang dianggap membahayakan

Dari gerakan *klandestien* kemudian berubah menjadi gerakan yang terbuka berkat reformasi politik dimana pemerintah menjamin adanya kebebasan pekerja/ buruh untuk mendirikan serikat kerja sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan demikian wadah gerakan pekerja/ buruh saat ini lebih melembaga karena mereka memiliki :

- format gerakan yang tegas
- struktur keorganisasian yang jelas
- kepentingan/sistem nilai politik yang diperjuangkan
- sosialisasi ide atau tujuan organisasi yang meliputi hak pesangon walau pun kena PHK, cuti, uang penghargaan dan pesangon kalau mengunduran diri suka rela dan upah kerja yang mengikuti perkembangan pasar.

Berbagai elemen organisasi pekerja/ buruh atau LSM yang simpati dengan perjuangan buruh pun sependapat bahwa sumber ketidakadilan dalam sistem

pengupahan saat ini terletak pada terlalu dominan dan sentralisnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan pengupaha. Ada tiga jalur institusional yang harus dilalui dalam memutuskan upah pekerja :

- Komisi pengupahan yang terdiri dari wakil-wakil pengusaha, buruh dan Depnaker (pemerintah) yang dikenal dengan istilah Tripartit
- Dari sidang komisi pengupahan diajukan ke kepala daerah (Gubernur) untuk mendapat pengesahan
- Persetujuan DPRD

Acapkali perundingan untuk menentukan besarnya kenaikan UMP (Upah Minimum Propinsi) melalui proses yang lama, minimal 4 bulan sidang-sidang dalam Komisi Pengupahan. Proses demikian dinilai aktivis terlalu lamban sehingga mereka lebih serng menggunakan bentuk-bentuk tekanan lewat aksi demo massal untuk mendesak percepatan UMP yang baru. Contohnya, ketika demo besar-besaran kalangan pekerja/ buruh tahun 2000 dimana berbagai elemen buruh bersatu mendukung kenaikan UMR. Waktu itu 19 elemen pekerja/ buruh mengecam UMR 2000 yang terlalu rendah dan hanya menguntungkan pengusaha. Kecaman terhadap pemerintah disejajarkan dengan regime produk kolaborasi dengan kapitalis, yang dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pemiskinan buruh di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Pluralisme gerakan pekerja/ buruh di Surabaya

Reformasi politik merupakan variabel kunci terjadinya perubahan dalam gerakan pekerja/ buruh dari yang bercorak hegemonik negara ke pluralis politik. Disahkannya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh membuka kesempatan lahirnya berbagai organisasi pekerja/ buruh. Respon atas pluralisme politik ini disambut antusias oleh kalangan aktivis pekerja/ buruh dengan dideklarasikannya sekitar 23 organisasi pekerja/ buruh di Surabaya.

B. Peta pemikiran/ ideologi politik gerakan pekerja/ buruh

Peta pemikiran/ ideologi politik gerakan pekerja/ buruh secara umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa isu politik :

- demokrasi sosial, anti diskriminasi dan anti kapitalisme yang secara umum disuarakan oleh FNPBI, Kelompok Kerja Sosialis dan SBR. Ketiganya cenderung mengembangkan pemikiran kritik sosial sebagai kerangka analisis dalam melihat praktik eksploitasi majikan - buruh. FNPBI yang didominasi kalangan intelektual kampus yang berafiliasi pada PRD dan SBR serta KKS yang dirintis aktivis LSM merupakan organisasi pekerja/ buruh yang memiliki pandangan politik keras terhadap praktik-praktik ketidakadilan dalam hubungan industrial.

- Pandangan yang lebih pragmatis yang tercermin dari sikap-sikap umum organisasi pekerja/ buruh bahwa buruh sudah selayaknya mendapat perhatian pemerintah dan pengusaha. Nuansa perjuangan ideologi tidak terlalu dominan menjadi wacana dan tujuan umum dari organisasi pekerja/buruh yang pragmatis ini adalah wadah dalam mengartikulasikan tuntutan-tuntutan ekonominya.
- Nuansa agama juga kental menjadi pengikat organisasi pekerja/ buruh seperti digunakan Sarbumusi dan SPMI, Kelompok Pendampingan Keuskupan Surabaya (lebih berupa LSM) guna mendampingi pekerja/ buruh dalam mengartikulasikan kepentingan mereka.

C. Saran-saran

- Penelitian menyangkut sosilogi pekerja/ buruh relevan dilakukan untuk memberi gambaran bahwa kondisi Surabaya sebagai kota industri menyimpang potensi-potensi dinamika sosial yang dapat mengarah pada munculnya konflik kelas dalam masyarakat.
- Karena itu, penelitian-penelitian seputar konflik-konflik ekonomi politik yang melibatkan pekerja - pengusaha perlu dicari akar permasalahannya yaitu apakah konflik pekerja/buruh - pengusaha disebabkan tuntutan-tuntutan ekonomis ataukah mengarah pada tuntutan yang ideologis dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 NOV 2003

PAMERAN

- Clark, John, *Democratizing Development, The Role of Voluntary Organisation*, Connecticut, Kumarian Press, 1990
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok Kepentingan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Evers, Hans-Deiter, *Kelompok-Kelompok Strategis*, Jakarta, Yayasan Obor, 1990
- Gurr, Ted Robert, *Why Man Rebel*, New Jersey, Princetown University Press, 1974
- Hadiz, Vedi, *Contradiction of Corporatism : Workers and The State In New Order Indonesia* (PhD Thesis, Murdoch University, 1996
- Loh, Cheng Koi, *Banyak Jalan Satu Tujuan*, Surabaya, Humanika, 1993
- Uwiyono, *Serikat Pekerja dan Peningkatan Hak-Hak Asasi Serta Standar Ketenagakerjaan di Indonesia*, <http://psi.ut.ac.id/jurnal/101uwiyono.htm>
- Undang-Undang No. 21 Th. 2000 Tentang Serikat Kerja
- Undang-Undang No. 9 Th 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Wibawanda, Agung, *Siasat Buruh Dibawah Represi*, Jogjakarta, Lapera, 1998

